

SINERGI PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA ADAT DALAM MELAKSANAKAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

(Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo *Sabrang Kulon* Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan)

Ayu Mukhtaromi¹, Mochammad Saleh Soeaidy¹, Ainul Hayat¹

¹Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
e-mail: ayumukhtaromi@yahoo.co.id

Abstract : *Synergy of Local Government and Traditional Institution in Implementing Cultural Conservation.* Cultural variety with kinds of preservation in Indonesian, example is Tengger culture in Bromo, the management is belong to local government, followed of the traditional institutions, which forming a cooperation about preservation culture, that is synergy. The purpose in this research to describe and analyze about implementing of the synergy, synergy results, the supporting and inhibiting factors. This study uses descriptive research with qualitative approach. The synergy of local government and traditional institutions in implementing cultural conservation has been successful, it can be seen from each actors, the programs, as well as means and infrastructure. This synergy has brought positive results to value of culture and social change communities and the success to develop cultural tourism products. The supporting factors are: the content of the regulations, application of the principles and provisions of synergies by actors. Inhibiting factors: Capacity of human resource; Problems conservation area, autonomy, and the important is there is no local regulation that manage conservation such as culture in Bromo Tengger.

Keywords : *Synergy, Traditional Institution, Culture And Tengger Bromo,*

Abstrak: Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan. Terkait keanekaragaman budaya serta jenis pelestarian di Indonesia, salah satunya adalah Budaya Suku Tengger Bromo, dalam pengelolaannya yang berwenang adalah pemerintah daerah diikuti peran lembaga adat, yang membentuk sebuah kerjasama dalam melaksanakan pelestarian, yakni sinergi. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sinergi, faktor pendukung dan penghambat sinergi, serta hasil sinergi dalam melaksanakan pelestarian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan ternyata berhasil, dilihat dari aktor pelaksana, program, serta sarana dan prasarannya. Sinergi ini ternyata membawa hasil positif terhadap nilai budaya dan perubahan sosial masyarakat tengger *sabrang kulon*, serta keberhasilan dalam mengembangkan potensi wisata. Faktor pendukungnya adalah isi peraturan yang mudah dimengerti, sikap aktor pelaksana dalam menerapkan prinsip sinergi dan ketentuan peraturan. Faktor penghambatnya adalah Kapasitas SDM, dan permasalahan area konservasi, otonomi daerah. Masih ada celah dalam melaksanakan sinergi karena tidak terdapat Perda khusus yang mengatur masalah pelestarian Kebudayaan Suku Tengger Bromo.

Kata Kunci : Sinergi, Lembaga Adat, Budaya & Tengger Bromo.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya yang tersebar diseluruh wilayahnya, yang mana jenis kebudayaan dan bentuk pelestariannya berbeda-beda. Keanekaragaman budaya di

Indonesia mempunyai keterikatan antara alam dan masyarakat. Budaya merupakan kekayaan bangsa yang mesti dilestarikan untuk kepentingan nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Untuk mempertahankan sesuatu yang dimiliki, Pemerintah Indonesia

selalu melakukan pengembangan dan pelestarian dengan memanfaatkan kekayaannya seperti kebudayaan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, maka untuk melaksanakan tujuan nasionalnya dilakukan melalui Desentralisasi kekuasaan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004. Terkait dengan asas Desentralisasi yang melaksanakan pengembangan dan pelestarian adalah pemerintah daerah diwakili oleh SKPD yang berhubungan dengan kebudayaan, diikuti dengan peran serta organisasi masyarakat yakni Lembaga Adat yang bernaung dalam kebudayaan tersebut.

Menurut Koentjaraningrat (1984, h.83) Pelestarian kebudayaan merupakan sebuah sistem yang besar, mempunyai berbagai macam komponen yang berhubungan dengan subsistem kehidupan di masyarakat. Kebudayaan merupakan cikal bakal dari masyarakat. Budaya dibuat oleh masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa budaya, yang berarti hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Terkait dengan pelestarian kebudayaan, pemerintah Indonesia sudah memberikan regulasi mengenai pedoman pelaksanaan pelestarian kebudayaan di suatu daerah, contohnya seperti pelestarian kebudayaan Suku Tengger Bromo *sabrang kulon*. Dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan, pemerintah daerah mengacu pada beberapa peraturan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah; diperkuat dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; diperinci dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; serta dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan, organisasi masyarakat, yakni Lembaga Adat yang menjadi mitra pemerintah daerah juga

memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah, semisal pelestarian kebudayaan daerah Suku Tengger Bromo *sabrang kulon* yang ada di Kabupaten Pasuruan, yang mana pemerintah daerah diwakili oleh SKPD kebudayaan yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan bersama dengan Lembaga Adat diwakili Dukun Adat Suku Tengger Bromo *Sabrang Kulon* di Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, melakukan sebuah kerjasama. Bentuk kerjasama ini merupakan dua konsep yang unik, artinya manakala keduanya (yang bekerjasama) bisa berperan sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek. Pemerintah daerah memfasilitasi organisasi masyarakat / lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian budaya, jelas pemerintah daerah sebagai obyek dan lembaga adat menjadi subyek. Sebaliknya bahwa lembaga adat dipercaya masyarakat untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakatnya, seperti lembaga adat Suku Tengger Gunung Bromo *sabrang kulon*, maka lembaga adat berposisi sebagai obyek dan pemerintah daerah menjadi subyek, kerjasama inilah yang disebut dengan Sinergi.

Berdasarkan pra-riset sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yakni Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan Suku Tengger Bromo; Hasil sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan; Faktor pendukung dan penghambat sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan Suku Tengger Bromo

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris: *public administration* yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Administrasi Negara. Menurut pengertian Chandler & Plano (1988, h.29-30)

dalam “*Public Administration Dictionary*”, administrasi publik adalah proses sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dalam pengertiannya, administrasi publik diartikan sebagai sebuah tata cara pemerintahan untuk mengatur dan memanfaatkan apa yang ada di suatu Negara demi kepentingan bersama.

2. Administrasi Pemerintah Daerah

Seperti yang diutarakan oleh Saparin (1970,h.26), “Administrasi Pemerintahan ialah semua kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari pada tujuan Pemerintah”. Dalam kaitannya menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan pemerintah daerah terbagi atas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Yang mana dalam melaksanakan pemerintahan menganut asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Berdasar pada asas dekonsentrasi maka provinsi, kabupaten/kota merupakan wilayah administrasi yang merupakan implikasi logis dari penerapan asas tersebut. Berdasarkan asas desentralisasi maka provinsi, kabupaten/kota menjadi daerah otonom (*local self government*). Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota menjadi wilayah administrasi sekaligus daerah otonom.

3. Administrasi Pariwisata

Administrasi Pariwisata atau yang biasa dikenal dengan Administrasi pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut

Cox (dalam Dowling dan Fennel, 2003,h.2), Administrasi pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Pembangunan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan;
- b. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata;
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada kekhasan budaya lokal;
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

Menurut Kusudianto (1996,h.23), sehubungan dengan penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang menyangkut pengembangan potensi obyek dan daya tarik pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan, perencanan, pelestarian, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk menyelenggarakannya. Keseimbangan antara pembangunan dan konservasi menjadi faktor yang esensial bagi keberlanjutan pariwisata. Sehingga tercapailah administrasi pengelolaan pariwisata yang berperan strategis untuk kelangsungan: a) Perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan; b) Keberlanjutan ekonomi; c) Peningkatan Integritas nilai asli Budaya; d) Nilai Pendidikan dan Pembelajaran.

4. Lembaga Adat

Lembaga adalah pola organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai suatu ketetapan. Sumner telah menunjukkan bahwa lembaga adalah suatu konsep yang berpadu dengan struktur. Menurut Mooney (2000,h.204) lembaga dibentuk berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a) *Cara*; b) *Kebiasaan*; c) *Adat Istiadat*. Menurut Roucek (1984,h.122) terdapat banyak jenis lembaga, salah satunya adalah Lembaga Adat. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan

berke-mbang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.

5. Nilai Budaya dan Masyarakat

a. Definisi Nilai Budaya

Konsep Budaya yang didefinisikan oleh Koentjaraningrat (1984,h.180) yaitu “Keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Koentjaraningrat (2005,h.75-76), menjelaskan “Nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan, baik yang kompleks maupun yang sederhana”.

b. Peran Nilai Budaya dan Masyarakat

Sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dari adat istiadat, budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang di nilai berharga dan penting oleh masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan masyarakat. Sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan warga masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1984,h.25), “Para individu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat karena merupakan bagian dari adat, nilai budaya biasanya dianut oleh suatu presentase yang besar dari warga suatu masyarakat”.

c. Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam satu daerah tertentu, yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju pada tujuan yang sama. Manusia menghasilkan kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Manusia, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lagi dipisahkan, sehingga kehidupan makhluk sosial dapat berlangsung. Koentjaraningrat (2005,h.20),

menjelaskan “Tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya, dan sela-manya merupakan dwitunggal”. Selain masyarakat sebagai pencipta, pendu-kung, dan pemelihara serta pengem-bang kebudayaan, masyarakatpun ber-upaya mewariskan, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan kepada generasi-generasi selanjutnya. Pewari-san budaya ini biasa disebut dengan *Enkulturas*i, Menurut Koentjaraningrat (2005,h.145), “Proses enkulturas i adalah proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebuda-yaan”. Proses ini telah dimulai sejak awal kehidupan dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas.

d. Masyarakat dan Perubahan Sosial

Dikutip oleh Soekanto (1995,h.336), Kingsley Davis dalam bukunya *Human Society* mengartikan perubahan sosial sebagai Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dapat dipahami bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dengan segala aspeknya dari satu kondisi ke kondisi yang baik yang bersifat positif atau menuju kemajuan maupun yang bersifat negatif atau menuju kemunduran. Perubahan sosial dalam masyarakat merupakan gejala alamiah yang selalu terjadi. Soekanto (1995,h.31) menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, yaitu: a) Faktor perubahan jumlah penduduk; b) Faktor adanya penemuan-penemuan baru; c) Pertentangan/ *conflict*; d) Terjadi pemberontakan atau revolusi.

6. Sinergi

Kata Sinergi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Synergos* yang berarti bekerja bersama /*working together*. Dalam Kamus American *Websters Dictionary*, istilah *Synergy* didefinisikan sebagai “*cooperative interaction among group especially among the acquired subsidiary or merged parts of a corporation that creates an enhanced*

combined effect” yang mengandung arti hanya dengan interaksi yang kooperatif maka hasil mak-simal dapat dicapai. Menurut Doctoroff (1977,h.76), persyaratan utama bagi suatu sistem sinergi yang ideal adalah keperca-yaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, dan kreativitas. Menurut Iversen (1997,h.38), landasan teori mengacu pada konsep “*competitive advan-tage, creating and sustaining perfor-mance*”, sedangkan dalam pelaksanaan terdapat prinsip dasar yang dijadikan acuan, yakni: Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi. Sinergi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegia-tan perusahaan atau pemerintahan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organi-sasi secara efisien dan efektif. Sesuai dengan yang ditulis oleh Iversen (1997,h.58) dalam *Concept of Synergy toward a Clarification*, pedoman kesiner-gian antara lain: a. Sinergi harus terpusat; b. Sinergi harus terpadu; c. Sinergi harus berkesinambungan; d. Sinergi mengguna-kan pendekatan multi instansional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan obser-vasi, wawancara dan dokumentasi. Instru-men penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Model Interaktif oleh Miles dan Huberman (1992,h.20) yaitu dengan cara pengum-pulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada pene-litian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Budaya Suku Tengger Bromo, sedangkan situs penelitian adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan dan Lembaga Adat Suku Tengger Bromo *sabrang kulon* di Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Dan yang menjadi fokus peneli-tiannya, yaitu: *pertama* Sinergi Pemerin-tah Daerah dan Lembaga Adat dalam melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Suku Tengger Bromo meliputi:

a) aktor pelaksana; b) program; c) sarana dan pra-sarana. *Kedua*, hasil Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melak-sanakan Pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo meliputi: a) nilai budaya dan perubahan sosial masyarakat; b) pengembangan potensi wisata. *Ketiga*, faktor pendukung dan penghambat Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebu-dayaan di Suku Tengger Bromo.

Pembahasan

1. Sinergi pemerintah daerah dan lem-baga adat dalam melaksanakan peles-tarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo.

Dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo, pemerintah daerah diwakili oleh SKPD yang berhubungan dengan kebudayaan yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan beserta lembaga adat yakni Duku Adat Suku Tengger Bromo di Tosari berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kema-sarakatan Bidang Kebudayaan, Ker-aton, dan Lembaga Adat Dalam Pele-starian dan Pengembangan Budaya Daerah; diperkuat dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri & Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Peles-tarian Kebudayaan,
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasu-ruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang menjelaskan mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pasuruan

Perihal sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan peles-tarian Kebudayaan di Suku Tengger Bromo, dapat dilihat dari:

Aktor Pelaksana

Yang dimaksud aktor disini adalah pelaksana teknis dan non-teknis dalam

melaksanakan pelestarian Kebudayaan di Suku Tengger Bromo. Di dalam peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan sinergi dalam melaksanakan program pelestarian, aktor pelaksana-nya adalah Kepala Bidang Seni dan Budaya beserta Staf, Kepala Bidang Pengembangan Wisata beserta Staf, aktor pelaksana sinergi lainnya dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pasuruan adalah Kepala Bidang Pemasaran Wisata beserta Staf. Aktor pelaksana yang tidak boleh dilupakan dan menjadi pelaksana non-teknis adalah Lembaga adat yang diwakili oleh Dukun Adat Suku Tengger Bromo di Desa Tosari.

Program

Program sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian budaya di Suku Tengger Bromo, telah sesuai dengan dasar ketentuan mengenai pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan yang dilakukan dalam beberapa bentuk dan telah memperhatikan keharusan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan juga ketentuan dalam menerapkan strategi sinergi yang ideal menurut Doctorof (1997,h.76), yaitu: kepercayaan, komunikasi, umpan balik, dan kreativitas dari masing-masing aktor pelaksana. Menurut Iversen (1997,h.58), program-program sinergi dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan Suku Tengger Bromo telah efektif, karena dalam pelaksanaan/penyelenggaraan menerapkan 3 prinsip sinergi, yakni: Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi. Program yang diselenggarakan adalah program *enkulturasi* (pewarisan budaya) dan pengembangan potensi wisata.

Sarana dan Prasarana

Terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program-program sinergi pelestarian kebudayaan adalah Pendanaan / Anggaran dan Mobil Wisata. Pendanaan /anggaran ini sudah ada di dalam pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007, yang mana dalam segala pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan yang menyangkut, pemanfaatan, pengelolaan, pengembangan didukung oleh Pendanaan

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan dalam penggunaan pendanaan/anggaran tersebut, harus dimanfaatkan se-efektif mungkin untuk mendukung jalannya pelaksanaan pelestarian, seperti dengan membeli Mobil wisata sebagai sarana untuk aktor-aktor pelaksana sinergi.

2. Hasil sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam melaksanakan pelestarian Kebudayaan di Suku Tengger Bromo, tujuan utamanya adalah menciptakan keberhasilan pelestarian kebudayaan, menciptakan sebuah kesinergian yang berkesinambungan, memberikan kemauan produk daya tarik wisata yang merupakan ciri khas Kabupaten Pasuruan, tanpa menghilangkan atau mengurangi keaslian Budaya Suku Tengger Bromo. Sesuai dengan sinergi ideal Doctorof (1997,h.76), dan pelaksanaannya berprinsip pada koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Iversen (1997,h.58), telah membawa hasil positif yakni :

Nilai Budaya dan Perubahan Sosial Masyarakat

Nilai Budaya Suku Tengger Bromo fungsi utamanya adalah membuat masyarakat pendukungnya tetap bersatu merasa memiliki kebudayaan sebagai jati dirinya. Menurut Koentjaraningrat (2005,h.75-76), pelaksanaan program pelestarian Budaya Suku Tengger Bromo dengan tidak mengurangi, merusak, dan menghilangkan keaslian dari nilai budaya telah terwujud karena sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat telah sesuai dengan peraturan, diperkuat dengan penerapan prinsip sinergi Iversen (1997,h.58) oleh aktor-aktor pelaksana. Dan keberhasilan tersebut, membawa suatu bentuk perubahan kearah yang lebih baik/positif.

Pengembangan Potensi Wisata

Di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 Tahun 2009, telah dibahas mengenai bentuk pelestarian

dapat dilakukan dengan pemanfaatan melalui pengembangan wisata, dan didalam program pengembangan wisata telah terwujud dan menghasilkan sebuah kemasan produk atau daya tarik wisata, menjadi ciri khas yang digagas Kabupaten Pasuruan, yakni Daya Tarik Wisata Kebudayaan Suku Tengger Bromo. Dalam keberhasilan mewujudkan suatu produk wisata, yang dalam pengembangannya tetap memperhatikan pelestarian lingkungan / *eco tourism*, serta mampu menempatkan kekuatan dan potensi masyarakat lokal, sebagai sendi pengembangan pariwisata / *community based*. Hal tersebut telah sesuai dengan yang diutarakan oleh Kusudianto (1996,h.23). Hal ini juga didukung oleh Cox (dalam Dowling & Fennel, 2003,h.2), yang mengatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pasuruan beserta lembaga adat Suku Tengger Bromo telah memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip berkelanjutan dan proteksi terhadap aspek budaya yang tidak bisa dipisahkan dengan aspek lainnya di dalam pengelolaan wisata budaya.

3. Faktor pendukung & penghambat sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo.

Sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo juga terdapat hal-hal yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, yakni:

Faktor Pendukung

- a. Isi peraturan yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan sinergi.
Rincinya isi ketentuan dan ketetapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; diperkuat dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Nomor 42 dan 40 Tahun 2009; diperjelas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pelestarian kebudayaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pasuruan beserta Lembaga Adat Suku Tengger (Dukun suku Tengger Tosari), sehingga mudah dimengerti dan

dipahami oleh semua aktor-aktor pelaksana.

- b. Penerapan Prinsip Sinergi dan Ketentuan Peraturan Oleh Aktor-Aktor Pelaksana.
Faktor lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melestarikan Kebudayaan di Suku Tengger Bromo adalah sikap dari aktor-aktor pelaksana sinergi, yakni pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Camat Tosari, kepala desa, beserta Dukun dan sesepuh adat Suku Tengger Bromo, masyarakat Suku Tengger Bromo di Tosari, yang mau menerima dan menerapkan prinsip sinergi dan ketentuan yang ada dalam peraturan. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masing-masing aktor pelaksana dalam menerapkan prinsip dan pedoman sinergi ideal Iversen (1997,h.58). Penerapan program sinergi yang dilaksanakan telah sesuai dengan Doctorof (1997,h.76).

Faktor Penghambat

- a. Rendahnya Kapasitas SDM
Penyebab terhambatnya pelaksanaan sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam pelestarian kebudayaan Suku Tengger Bromo adalah kapasitas SDM yang masih rendah. Rendahnya kapasitas SDM di Suku Tengger Bromo *Sabrang kulon* dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Faktor penghambat ini sesuai dengan apa yang dikatakan Soekanto (1995,h.40), sinergi dapat berdampak pada perubahan sosial kemandirian/ *progreess* apabila memperhatikan faktor-faktor yang mendukung. Akan tetapi, jika sinergi tidak memperhatikan faktor penghambat seperti Sifat dan pemikiran masyarakat yang masih tradisional, maka akan menyebabkan kemunduran/ *regress*.
- b. Permasalahan Area Konservasi, otonomi daerah, serta tidak adanya Perda khusus yang mengatur pelestarian kebudayaan Suku Tengger Bromo.
Sesuai peraturan yang dijadikan ketentuan dalam pelaksanaan sinergi, kewajiban Pemerintah Daerah perihal Budaya dilaksanakan oleh SKPD yang

membidangi kebudayaan. Contohnya Pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo, Desa Tosari dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan. Tetapi, Gunung Bromo dikelola oleh 4 daerah yang memiliki hak dan kewajiban pelestarian kebudayaan sesuai dengan otonomi daerah masing-masing. Hal inilah yang menjadi penghambat terlaksananya sinergi, karena daerah otonom adalah daerah yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo yang tidak pernah mencapai kesepakatan bersama untuk mengelola karena tiap-tiap daerah saling bersaing. Selain permasalahan tersebut, permasalahan lain Gunung Bromo Tengger telah masuk sebagai area konservasi Taman Nasional. Yang mana, SKPD terkait dengan hal tersebut adalah Perum Perhutani / Dinas Perhutanan di masing-masing wilayah. Permasalahan yang utama adalah tidak adanya Perda khusus yang mengatur pelaksanaan pelestarian kebudayaan Suku Tengger Bromo sehingga tidak tercipta tumpang tindih kekuasaan antar SKPD yang saling terkait dengan Gunung Bromo dan Kebudayaanannya.

Kesimpulan

- a. Sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo

sudah berhasil, dilihat dari peran dan komunikasi aktor pelaksana, program, sarana dan prasarana.

- b. Sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo, ternyata membawa hasil positif terhadap Kebudayaan Suku Tengger Bromo *sabrang kulon*, dilihat dari terjaganya nilai budaya dan perubahan sosial masyarakat ke arah kemajuan (*progress*) dan keberhasilan dalam mengembangkan potensi wisata kebudayaan Suku Tengger Bromo dengan memunculkan produk yang memiliki daya tarik dan ciri khas yang digagas oleh Kabupaten Pasuruan.
- c. Faktor pendukung sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo, adalah: Isi peraturan yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan sinergi; Penerapan prinsip sinergi dan ketentuan peraturan oleh aktor-aktor pelaksana.
- d. Faktor penghambat sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan di Suku Tengger Bromo adalah Rendahnya kapasitas SDM di Suku Tengger Bromo *sabrang kulon*; Area konservasi, otonomi daerah dan tidak adanya Perda khusus yang mengatur pelaksanaan pelestarian kebudayaan Suku Tengger Bromo.

Daftar Pustaka

- Chandler, R.C & Plano, J.C. (1988) **The Public Administration Dictionary**. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
- Doctoroff, Michael. (1977) **Synergistic Management**. New York, AMACOM Press.
- Dowling, RK and DA.Fennel. (2003) **The Context of Ecotourism Policy and Planning**. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Iversen, M. (1997) **Concept of Synergy-toward a clarification**. Departement of Industrial Economics and strategy, Copenhagen Business School.
- James, D.Mooney. (2000) **Institutional Culture**. Jakarta, PT.Gramedia Pustaka
- Koentjaraningrat (1984) **Kebudayaan Jawa**. Jakarta, Balai Pustaka
- _____ (2005) **Pengantar Antropologi I**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Kusudianto,Hadinoto. (1996) **Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata**. Jakarta, Universitas Indonesia Press.

- Miles, Matthew B & Michael. A. Huberman. (1992) **Analisis Data Kualitatif**. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 Tahun 2009 tentang **Pedoman Pelestarian Kebudayaan** [Internet] Available From: http://dprd.jatimprov.go.id/Peraturan_Bersama_Menbudpar_dan_Mendagri_No_40_dan_42_Tahun_2009_tentang_Pedoman_Pelestarian_Kebudayaan.pdf [Accessed 15 November 2012]
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang **Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah**. [Internet] Available From: http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/KAB_PASURUAN_12_2008.pdf [Accessed 15 November 2012]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2007 tentang **Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah**. [Internet] Available From: http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/Dagri_No_39_2007.pdf [Accessed 15 November 2012]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang **Pedoman Penataan Lembaga Masyarakat** [Internet] Available From: http://www.pnpm-perdesaan.or.id/PERMENDAGRI_5_TH_2007_KELEMBAGAAN_MASYARAKAT_DESA.pdf [Accessed 15 November 2012]
- Saparin (1986) **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. (2002) **Sosiologi Suatu Pengantar**. Edisi 4, Jakarta, PT. Gramedia
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah** [Internet] Available From: [http://www.kpu.go.id/documents/UU_32_2004_Pemerintahan Daerah.pdf](http://www.kpu.go.id/documents/UU_32_2004_Pemerintahan_Daerah.pdf) [Accessed 05 Desember 2012]
- Wiraatmadja, Soekandar. (1976) **Sosiologi Pedesaan**. Jakarta, CV Yasaguna.